



## **WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

**KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR e-0005 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)  
PADA KECAMATAN DAN KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA  
ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 9 angka (1) huruf g Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pengguna Anggaran memiliki tugas dan kewenangan menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- b. bahwa sehubungan dengan adanya kekosongan Jabatan Lurah serta telah ditetapkannya surat perintah tugas untuk Pelaksana Tugas (Plt) Lurah, berdasarkan Surat Perintah Tugas Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai berikut:
1. Surat Perintah Tugas Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor e-0037/KG.11.00 Tanggal 27 Desember 2023 Tentang Pelaksana Tugas (Plt) Lurah Kelurahan Cipulir.
  2. Surat Perintah Tugas Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor e-0038/KG.11.00 Tanggal 27 Desember 2023 Tentang Pelaksana Tugas (Plt) Lurah Kelurahan Ragunan.

3. Surat...

3. Surat Perintah Tugas Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor e-0042/KG.11.00 Tanggal 29 Desember 2023 Tentang Pelaksana Tugas (Plt) Lurah Kelurahan Karet Semanggi.

- c. bahwa kegiatan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sesuai tugas dan kewenangan dilaksanakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang telah memenuhi persyaratan untuk selanjutnya ditetapkan oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 10 dan pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c serta dalam rangka mendukung pengadaan barang/jasa pada Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Selatan perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kelurahan dan Kecamatan di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
  - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
  - 3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

8. Peraturan...

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2079);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2007);
13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 205, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2037);
14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 Nomor 206);
15. Peraturan...

15. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 51038) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 71034);
16. Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 51039);
17. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 71023) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta Tahun 2023 Nomor 71012);
18. Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 Nomor 62027);
19. Keputusan Gubernur Nomor 357 Tahun 2023 Tentang Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 666 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 357 Tahun 2023 Tentang Kuasa Pengguna Anggaran.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TENTANG PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA KECAMATAN DAN KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024.

**KESATU** : Menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

**KEDUA...**

- KEDUA** : Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berdasarkan penunjukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- KETIGA** : Dalam hal tidak ada personil yang memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) maka Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- KEEMPAT** : Dalam hal terdapat perubahan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), maka KPA mengusulkan kembali nama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- KELIMA** : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana diatur pada Pasal 11 angka (1) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 memiliki tugas sebagai berikut :
- a. menyusun perencanaan pengadaan;
  - b. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
  - c. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
  - d. menetapkan rancangan kontrak;
  - e. menetapkan HPS;
  - f. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
  - g. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
  - h. melaksanakan E-Purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp 200.000.000,00,- (dua ratus juta rupiah);
  - i. mengendalikan kontrak;
  - j. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
  - k. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
  - l. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
  - m. menilai kinerja Penyedia;
  - n. menetapkan tim pendukung;
  - o. menetapkan tim ahli atau tenaga ahli; dan
  - p. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa

KEENAM...

- KEENAM : Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA, PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi:
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
  - b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.
- KETUJUH : Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tidak diperkenankan mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani kontrak dengan penyedia barang/jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang dapat mengakibatkan terlampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai dari APBD.
- KEDELAPAN : Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
- KESEMBILAN : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 2 Januari 2024.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Januari 2024

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN



MUNJIRIN

NIP197108011994031002

Tembusan :

1. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
2. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan
3. Para Asisten Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan
4. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Selatan
5. Para Kepala Bagian Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan
6. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Selatan

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA KECAMATAN DAN KELURAHAN  
 DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN  
 TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Unit Kerja	Nama Pejabat Pembuat Komitmen	NIP
1	2	3	4
<b>I. Kecamatan Kebayoran Lama</b>			
1	Kecamatan Kebayoran Lama	Iwan K Santoso, A.P	197412261994121001
2	Kelurahan Kebayoran Lama Utara	Atmah, S.E, M.Si	196606111987112001
3	Kelurahan Kebayoran Lama Selatan	Drs. Erwan Yossiawan, M.M.	196806111997031003
4	Kelurahan Grogol Utara	Sariman, S.Sos, M.Si	197706022006041015
5	Kelurahan Grogol Selatan	Andy Nurcahya, S.Si	198405052010011024
6	Kelurahan Pondok Pinang	Rizki Januar, S.STP	198301062001121004
7	Kelurahan Cipulir	Andy Nurcahya, S.Si	198405052010011024
<b>II. Kecamatan Pesanggrahan</b>			
1	Kecamatan Pesanggrahan	Dr. Agus Ramdani, S.Sos.,MAP	197908141998031001
2	Kelurahan Petukangan Utara	Syopwani, S.STP	198608022004121001
3	Kelurahan Ulujami	Twicetian Yudha Irawan, S.STP	199203032012061001
4	Kelurahan Bintaro	Riza Fauzi	198702282010011006
5	Kelurahan Pesanggrahan	Jumadi, S.STP	197907161998101001
6	Kelurahan Petukangan Selatan	Thia Mutiara Hadyanti, S.Stp.,M.Si	198303032001122003
<b>III. Kecamatan Pasar Minggu</b>			
1	Kecamatan Pasar Minggu	Arief Wibowo	197005311991011002
2	Kelurahan Cilandak Timur	Agus Muharam, SH	196704111997031007
3	Kelurahan Jatipadang	Ir. Salim Elfuar	196609261998031004
4	Kelurahan Kebagusan	Rudi Budijanto, SE	197302081997031002
5	Kelurahan Pasar Minggu	Puji Meilita Sugiana	198705162006022001
6	Kelurahan Pejaten Barat	Asep Ahmad Umar	197404221999031001
7	Kelurahan Pejaten Timur	Moch Rasyid	196710231998031003
8	Kelurahan Ragunan	Asep Ahmad Umar	197404221999031001
<b>IV. Kecamatan Jagakarsa</b>			
1	Kecamatan Jagakarsa	Santoso, SH.,M.A.P	197703112006041014
2	Kelurahan Lenteng Agung	Ahmad Hasan Husaini	196903021998031008
3	Kelurahan Jagakarsa	Muhamad Hasan, S.Sos	197104131994031005
4	Kelurahan Ciganjur	Yuyun Ayunah, SKM	197102181992032002
5	Kelurahan Srengseng Sawah	Sarca	196707211986031001
6	Kelurahan Tanjung Barat	Ali Haryanto	197907112008011018
7	Kelurahan Cipadak	Fatihien Tajul Anwar	197605081999031003
<b>V. Kecamatan Mampang Prapatan</b>			
1	Kecamatan Mampang Prapatan	Ujang Harmawan	197502091993111001
2	Kelurahan Bangka	Firdaus Aulawy Rois	197802101966121001
3	Kelurahan Mampang Prapatan	Sulastri, SKM., MAP	197101181996032002
4	Kelurahan Pela Mampang	Yunaenah	196611091989032007
5	Kelurahan Tegal Parang	Narip Aripin, SH., M.Tr.IP	196602021987031003
6	Kelurahan Kuningan Barat	Isno Usnodo, S.Sos	198104032010011020
<b>VI. Kecamatan Pancoran</b>			
1	Kecamatan Pancoran	Alamsah	196912121991011002
2	Kelurahan Pancoran	Drs. Rachmat Basuki, M. Si	196807251997031004
3	Kelurahan Duren Tiga	Hifzillah	197701301997021001
4	Kelurahan Kalibata	Herman	197211221997031003
5	Kelurahan Rawajati	Supeno	196808081990031007
6	Kelurahan Pengadegan	Hifzillah	197701301997021001
7	Kelurahan Cikoko	Fitrianti	198307122010012041



No.	Unit Kerja	Nama Pejabat Pembuat Komitmen	NIP
1	2	3	4
<b>VII. Kecamatan Kebayoran Baru</b>			
1	Kecamatan Kebayoran Baru	Tomy Fudihartono, S.Sos, M.Si	197203271992031005
2	Kelurahan Gandaria Utara	Muhammad Fahri	199006242012061001
3	Kelurahan Cipete Utara	Supriyanto, S.STP., M.Si	198004221998101003
4	Kelurahan Pulo	Sumarmi, SE	197103121996032002
5	Kelurahan Petogogan	Nina Permata, S.STP	198211272001122002
6	Kelurahan Melawai	Chenris Rahmasari	197710231998032001
7	Kelurahan Kramat Pela	Achmad Syarief, SH	197403131998031004
8	Kelurahan Gunung	Elvita Rahmadani Rangkuti	197906192014092005
9	Kelurahan Selong	Murniasih, S.E., M.AP	198011102005012018
10	Kelurahan Rawa Barat	Merinta Hendri Purnomo	197603021995111001
11	Kelurahan Senayan	Siti Fauziah Ghozali, S.Sos, M.M	197206061996032003
<b>VIII. Kecamatan Setiabudi</b>			
1	Kecamatan Setiabudi	Iswahyudi, S.Sos, M.Si	197211181992031002
2	Kelurahan Setiabudi	Bayu Pasca Soengkono, S.Sos	197803241998031002
3	Kelurahan Karet	Ahmed Garibaldi	198101152009041006
4	Kelurahan Guntur	Leo Yudhantara Harahap	198508092003121003
5	Kelurahan Karet Semanggi	Sih Purwanti Rahayu	197009071994032004
6	Kelurahan Karet Kuningan	Istambul Afrikana, S.Sos., M.M.	196801121999031004
7	Kelurahan Kuningan Timur	Sih Purwanti Rahayu	197009071994032004
8	Kelurahan Menteng Atas	Wawan Hermawan, SPd. Msi	197101121995031002
9	Kelurahan Pasar Manggis	Hj, Purwati, S.AP	197109161991032001
<b>IX. Kecamatan Tebet</b>			
1	Kecamatan Tebet	Achmad Basyaruddin	197303181992031002
2	Kelurahan Menteng Dalam	Dina Roslina, S.STP	198707112006022002
3	Kelurahan Tebet Timur	Lukman Haris	197007061996031003
4	Kelurahan Tebet Barat	Mardani Supriadi	196601081991091001
5	Kelurahan Bukit Duri	Atiaturrahmah	197701111998032004
6	Kelurahan Manggarai Selatan	Muhamad Sidik, SE, M.Si	197807132010011008
7	Kelurahan Kebon Baru	Mariana, SH, M.Si	196803061993122001
8	Kelurahan Manggarai	Muhamad Arafat Dinsirat, S.Sos	197706061999031006
<b>X. Kecamatan Cilandak</b>			
1	Kecamatan Cilandak	Djharuddin, M.Si	197007181998031004
2	Kelurahan Gandaria Selatan	Agung Meidya Gutama, AP, M.M.	197505281993111001
3	Kelurahan Cipete Selatan	H. Fuad, SE	197109151998031006
4	Kelurahan Cilandak Barat	Ilham Prasetyo, S.STP	199307102014061001
5	Kelurahan Pondok Labu	Nachnoer Vernier Atom Arss	198312042010011015
6	Kelurahan Lebak Bulus	H. Jaenudin, S. Sos	196707281989071001


  
 WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

MUNJIRIN  
 NIP. 197108011994031002